

MADANI Insight

*“Gambaran Industri Sawit Indonesia,
Menjawab Asumsi dengan Fakta dan Angka”*

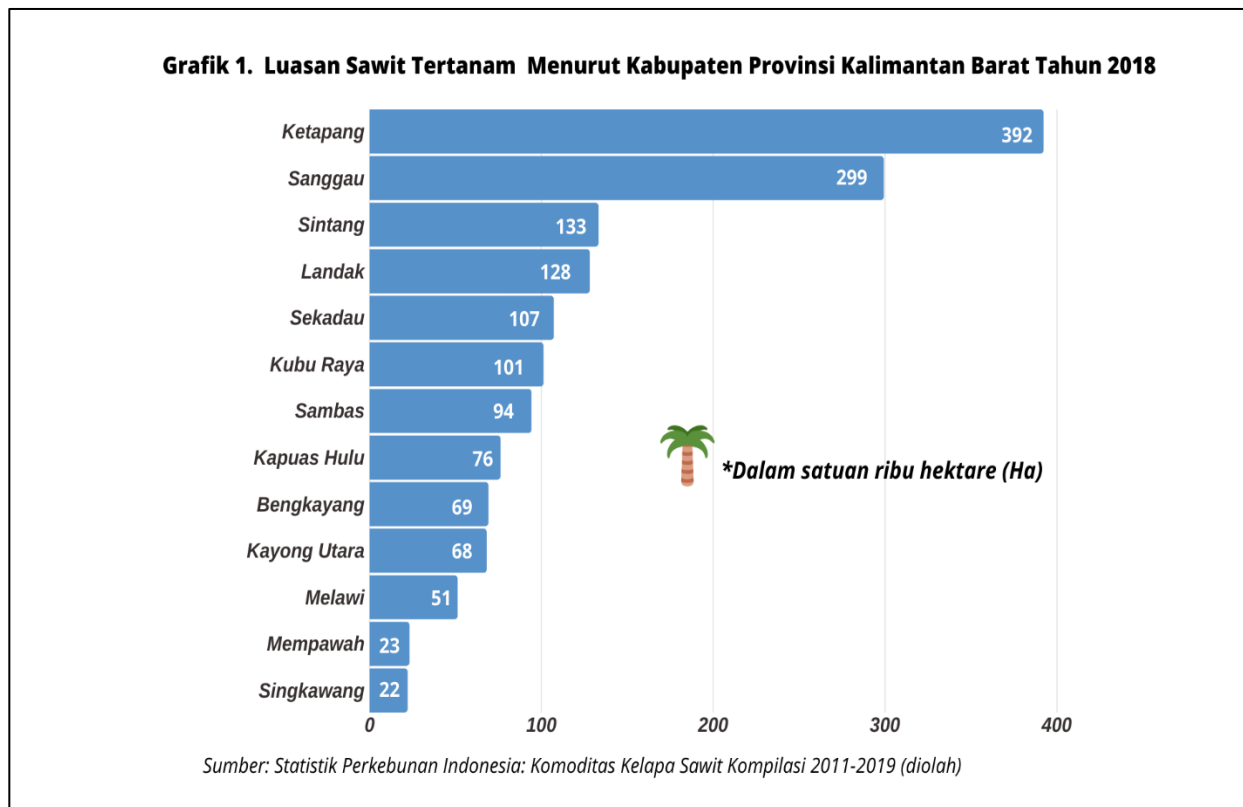


SOROTAN UTAMA

- **Sawit dan Kemiskinan Masyarakat Kalimantan Barat**
Tidak serta merta pembangunan perkebunan sawit di suatu wilayah akan membawa berkurangnya kemiskinan di Kalimantan Barat. Dari lima kabupaten dengan sawit tertanam yang terluas, hanya dua kabupaten yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan provinsi.
- **Luas dan Produktifitas Sawit Kalimantan Barat**
Meski luasan sawit tertanam Kalimantan Barat terbesar nomor tiga secara nasional, namun tidak dengan tingkat produktifitasnya. Dari sepuluh provinsi dengan luasan sawit tertanam terbesar, produktifitas sawit Kalimantan Barat menempati peringkat sepuluh.
- **Rekomendasi Desa Peduli Api Bagi Kalimantan Barat**
Dari 32 desa di Kalimantan Barat yang wilayahnya dekat dengan lahan konsesi sawit dengan titik terbanyak hanya satu desa yang masuk dalam prioritas patroli Manggala Agni. Upaya kolaboratif multipihak sangat mungkin untuk dilakukan demi efektifnya upaya pencegahan dan penanggulangan Karhulta di Kalimantan Barat ke depan.

Sawit dan Kemiskinan Masyarakat Kalimantan Barat

Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan provinsi dengan luas sawit tertanam terluas nomor tiga di Indonesia. Pada tahun 2011 luas perkebunan sawit di provinsi tersebut masih di angka 683 ribu hektar (ha) dan berkembang menjadi 1,53 juta ha pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan 121 ribu ha per tahun. Terdapat berbagai spekulasi mengenai peningkatan luasan sawit tertanam tersebut, ada yang beranggapan pertumbuhan didorong oleh permintaan pasar global¹ dan juga untuk pertumbuhan ekonomi regional². Terlepas dari sebab peningkatan luasan tersebut, terdapat sebuah pemahaman umum bahwa sawit memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Untuk melihat korelasinya secara langsung, kita dapat melihat terlebih dahulu pada data luasan sawit tertanam di tiap kabupaten pada Grafik 1 di bawah ini.



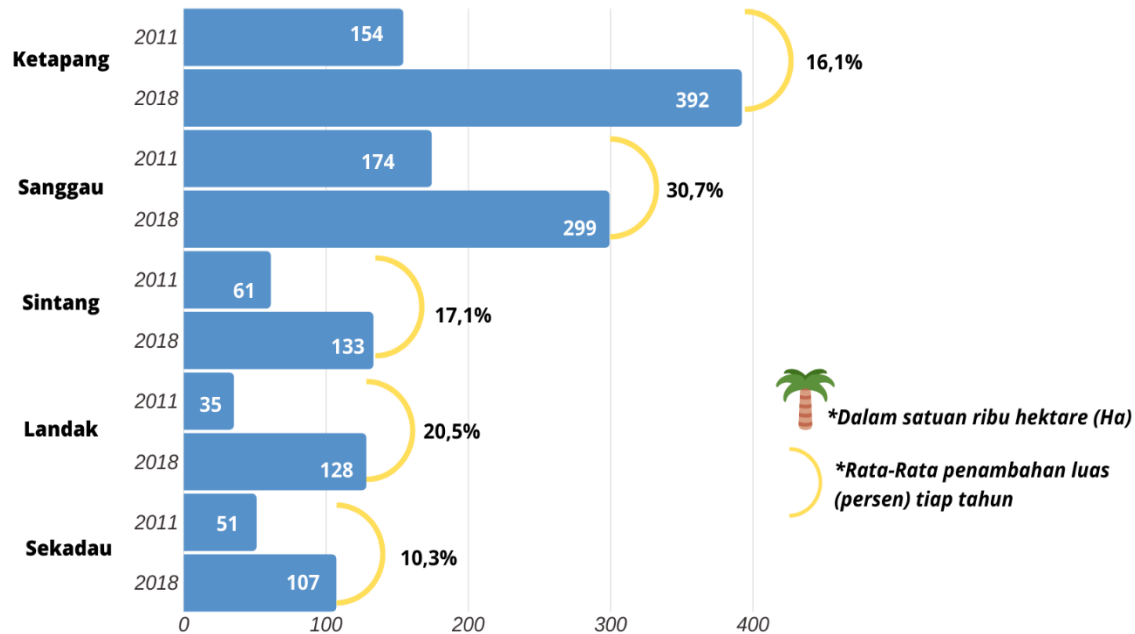
Kabupaten Ketapang menduduki peringkat pertama kabupaten dengan luasan sawit tertanam yang terluas (392 ribu ha) di seluruh Kalimantan Barat. Diikuti oleh Sanggau (299 ribu ha); Sintang (133 ribu ha); Landak (128 ribu ha) dan Sekadai (107 ribu ha). Meski Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan luas sawit tertanam paling besar di Kalbar, laju rata-rata pertumbuhan luas sawit di kabupaten ini pada periode 2011 hingga 2018 hanya sebesar 16,13% atau secara rata-rata naik sebesar 24,8 ribu ha per tahunnya. Sedangkan laju rata-rata pertumbuhan luasan sawit tertanam di kabupaten Sanggau pada periode 2011 hingga 2018 mencapai sebesar 30,78% atau secara rata-rata naik sebesar 53,6 ribu ha per tahunnya. Sehingga Sanggau menjadi kabupaten dengan laju pertumbuhan tercepat. Info selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 2.

¹ Marcus Colchester, dkk. Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat. 2011. Forest People Programme dan Sawit Watch

² Siregar, B. 2019. Sawit Mampu Gerakkan Pertumbuhan Ekonomi Pinggiran. Diakses melalui

<https://www.wartaekonomi.co.id/read254359/sawit-mampu-gerakkan-pertumbuhan-ekonomi-pinggiran.html> pada tanggal 23/01/20

Grafik 2. Rata-Rata Laju Penambahan Luas Sawit Tertanam Menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Periode 2011-2018



Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia: Komoditas Kelapa Sawit Kompilasi 2011-2019 (diolah)

Dari kelima kabupaten yang memiliki luasan sawit tertanam terluas di Kalbar, anggapan yang terbangun kemudian adalah kabupaten dengan sawit terluas memiliki tingkat kemiskinan yang sedikit. Anggapan ini didukung oleh berbagai diskursus yang terjadi di tengah masyarakat. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Gusti Hardiansyah yang mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, setidaknya ada empat kabupaten di Kalbar yang perkebunan sawitnya berkembang pesat. Keempatnya, yakni Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, dan Ketapang, seiring perkembangan perkebunan sawit di keempat kabupaten tersebut masyarakat pun semakin sejahtera.³ Hal senada juga diungkapkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalbar yang telah berulang kali mengatakan bahwa sawit terbukti secara empiris dalam upaya pengurangan kemiskinan.⁴ Namun demikian, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan sebaliknya, bahwa perkebunan sawit di Kalbar justru tidak berimbas langsung pada pengurangan kemiskinan.⁵

Berbicara tentang kemiskinan, berbagai pendapat tersebut apabila disandingkan dengan data rata-rata prosentase penduduk miskin di Kalbar, maka akan semakin jelas. Bahwa tidak serta merta pembangunan perkebunan sawit di suatu wilayah akan membawa berkurangnya kemiskinan. Dari lima kabupaten dengan sawit tertanam yang terluas (Ketapang, Sanggau, Sintang, Landak dan Sekadau), hanya Sanggau dan Sekadau yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan provinsi. Ketapang bahkan memiliki peringkat yang cukup tinggi, hingga mencapai 11,72% penduduk miskin. Padahal, kabupaten tersebut memiliki luasan sawit tertanam yang paling luas serta komoditas sawit mendominasi alokasi lahan perkebunan sebesar 92 %.⁶ Ketapang hanya menyisakan 8% lahan perkebunan untuk komoditas selain sawit. Lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah ini.

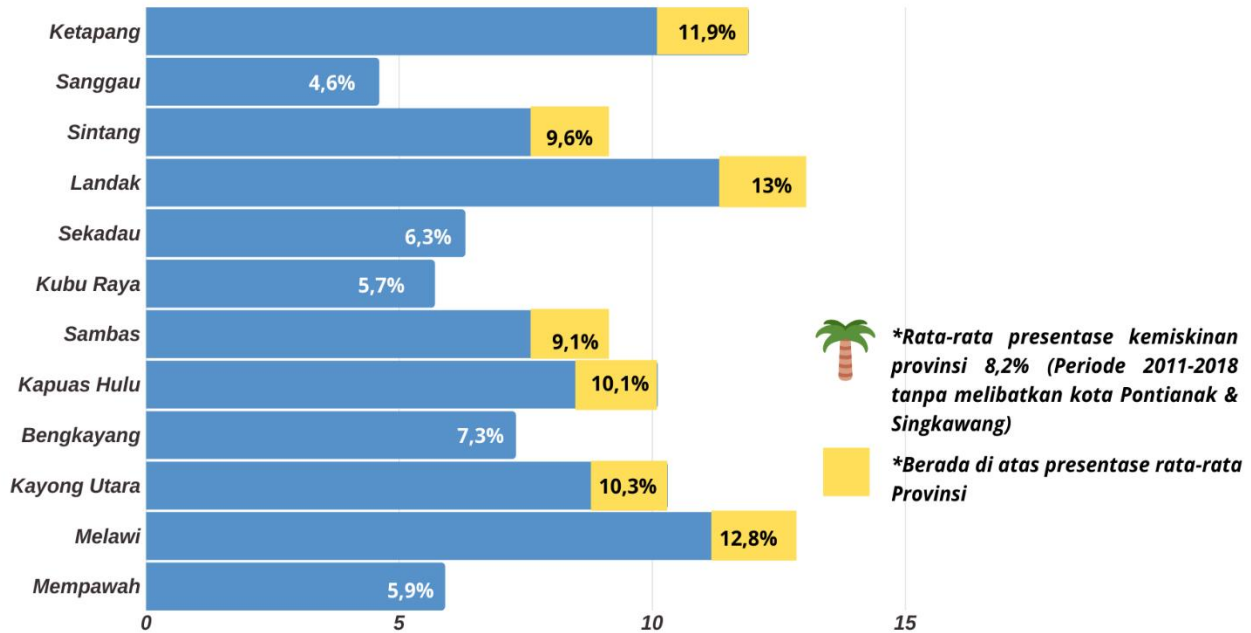
³ Sudarsono. 2019. Komoditas Sawit Gerakkan Ekonomi Kalbar. Diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/1437043/34/komoditas-sawit-gerakkan-ekonomi-kalbar-1567743092> pada 15/01/20

⁴ Purba, Jan Horas, dkk. 2011. Perkebunan Sawit Indonesia dalam Perspektif Berkelanjutan. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).

⁵ Tim Publikasi Katadata. 2019. Kalimantan Barat, Lumbung Sawit yang Masih Miskin. Diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2019/12/03/kalimantan-barat-lumbung-sawit-yang-masih-miskin> pada 15/01/20

⁶ BPS. 2019. Kabupaten Ketapang dalam Angka 2018 (diolah)

Grafik 3. Rata-Rata Presentase Kemiskinan Menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Periode 2011-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa tidak selalu berbanding lurus antara luasan sawit tertanam dengan pengurangan kemiskinan. Bahkan perbandingan ini menunjukkan kecenderungan yang berbalik. Daerah dengan rata-rata kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, seperti Sanggau dan Kubu Raya, faktanya memiliki komoditas perkebunan lain yang produktif serta ada faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Sanggau misalnya, dari total luas perkebunan daerah tersebut terdapat 28 % alokasi lahan untuk komoditas non sawit⁷. Komoditas tersebut meliputi karet (106 ribu ha), kakao (4.700 ha) dan lada (2.600 ha).⁸ Produksi ketiga komoditas tersebut juga relatif baik yakni karet (54 ribu ton), kakao (1.100 ton) dan lada (1.400 ton). Dari segi PDRB, meskipun dalam kurun waktu 2011-2018 sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan selalu menjadi penyumbang utama (di atas 35%), namun kontribusi sektor industri dan pengolahan maupun perdagangan besar dan eceran pun cukup besar yakni mencapai angka 18 % dan 11 %⁹ yang mengalokasikan sebagian lahan perkebunan untuk komoditas non sawit sebesar 42 %. Terdapat komoditas lain seperti: kelapa (41 ribu ha), karet (34 ribu ha) dan kopi (5 ribu ha). Produktifitas ketiga komoditas tersebut pada tahun 2018 pun relatif baik, dengan rincian kelapa (48 ribu ton), karet (15 ribu ton) dan kopi (5 ribu ton)¹⁰. Dari segi PDRB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kubu Raya hanya menempati peringkat kedua (12,13 %) masih tertaut di bawah sektor industri pengolahan (31,95%)¹¹.

⁷ BPS. 2019. Kabupaten Sanggau dalam Angka 2018 (diolah)

⁸ Ibid

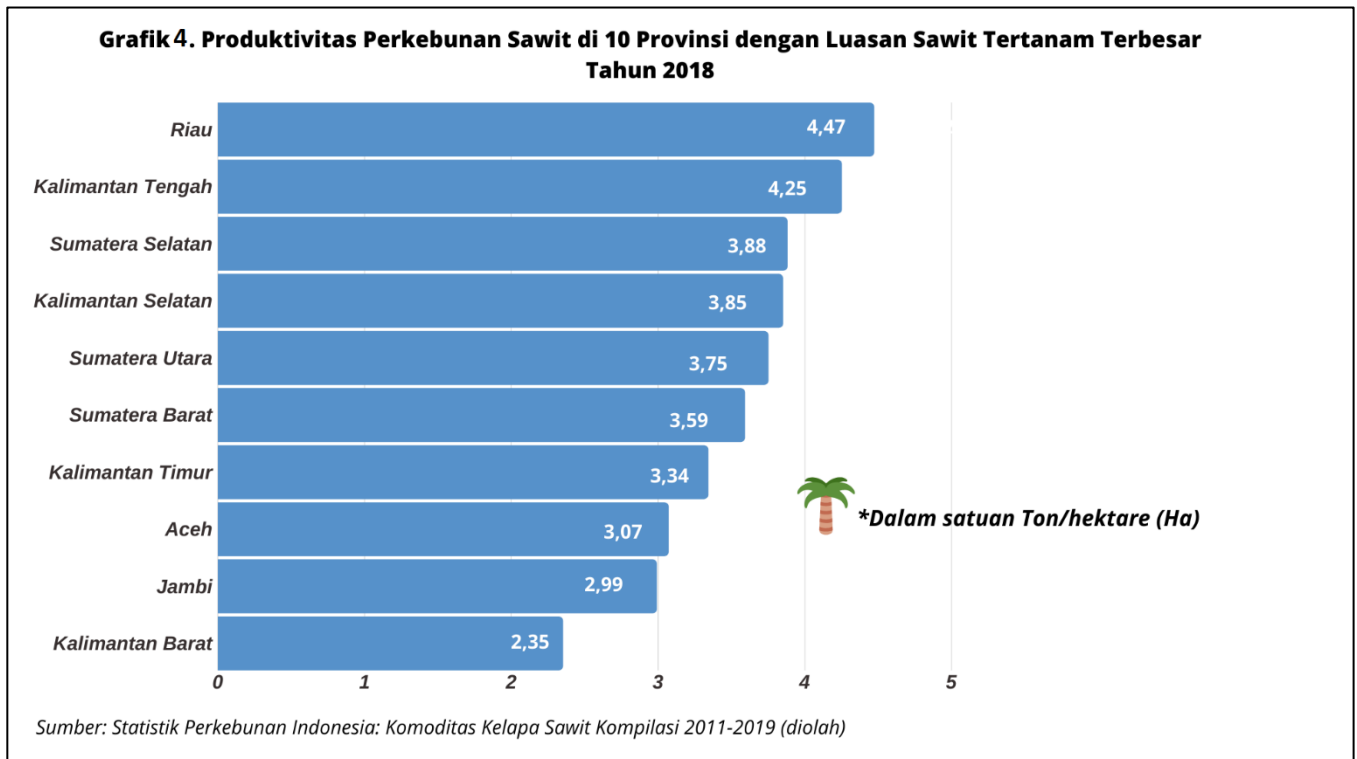
⁹ Loc.cit.

¹⁰ BPS. 2019. Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2018 (diolah)

¹¹ Ibid

Luas dan Produktifitas Sawit Kalimantan Barat

Meski memiliki luasan sawit tertanam yang terbilang besar, tidak serta merta membuat produktifitas perkebunan sawit Kalbar terbilang tinggi. Per tahun 2018, luas sawit tertanam Kalbar menyentuh angka 1,5 juta ha atau peringkat tiga terbesar secara nasional, di bawah Riau dan Sumatera Utara yang masing-masing memiliki luas 2,7 juta ha dan 1,6 juta ha. Pada tahun yang sama, produktifitas Kalbar berada di angka 2,35 ton/ha atau menempati peringkat ke 10 di antara provinsi penghasil sawit nasional. Tingkat produktifitas perkebunan sawit Kalbar bahkan tertinggal dari provinsi Aceh meskipun secara luasan Aceh hanya memiliki 514 ribu Ha sawit tertanam atau 1/3 dari luasan sawit yang dimiliki Kalbar. Lebih detail terkait fakta tersebut dapat dilihat pada Grafik 4 di bawah ini.

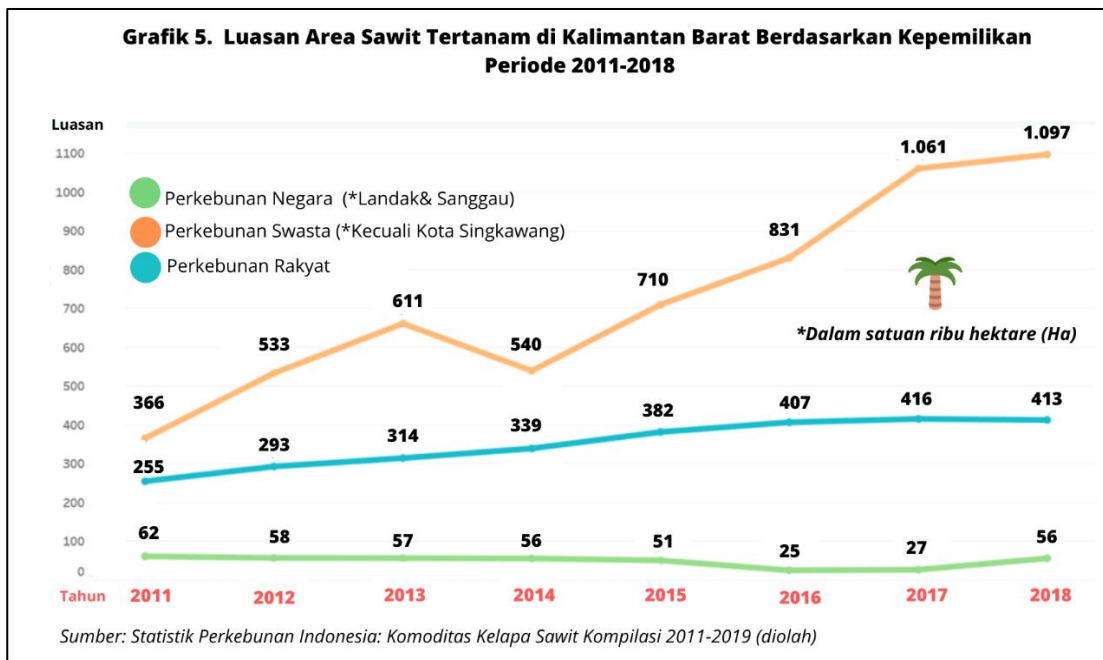


Terlepas dari sebab tertinggalnya produktifitas perkebunan sawit Kalbar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, produktifitas perkebunan rakyat selalu menjadi sorotan utama berbagai pihak dibandingkan dengan sektor lainnya¹². Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Florentinus Anum misalnya, menyatakan bahwa produktifitas perkebunan rakyat masih sekitar 50% dari target yang telah ditetapkan. Artinya baru sekitar 2 ton/ha/tahun sehingga perlu ditingkatkan¹³. Hal yang tak jauh berbeda diungkapkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan yang mengatakan bahwa petani swadaya perlu mendapatkan perhatian, salah satu soal pembenahan tata kelola untuk meningkatkan produktifitas¹⁴. Namun, tidak terlalu banyak pihak yang menyoroti kondisi luas dan produktifitas perkebunan swasta maupun negara di Kalbar. Untuk melihat secara rinci terkait dua isu di atas, kita dapat melihat pada data peningkatan luasan sawit berdasarkan kepemilikan pada Grafik 5 berikut.

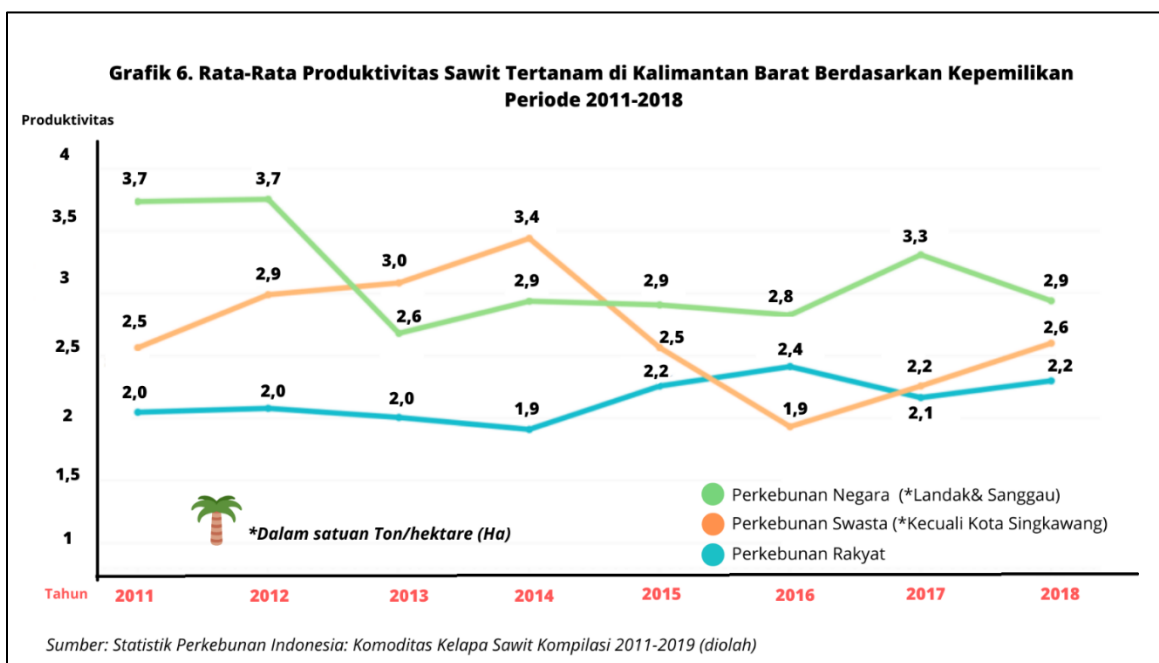
¹² Retno, M. 2019. Wapres Ma'ruf Amin Tekankan Fokus Tingkatkan Produktifitas Lahan dan Daya Saing. Diakses melalui http://rri.co.id/post/berita/741516/nasional/wapres_maruf_amin_tekankan_fokus_tingkatkan_produkatifitas_lahan_dan_daya_saing.html pada 26/01/20

¹³ Hermata. 2019. Kadisbun Kalbar Prihatin, Produktifitas Petani Sawit, Baru 50% Dari Target. Diakses melalui http://rri.co.id/pontianak/post/berita/752537/ekonomi/kadisbun_kalbar_prihatin_produkatifitas_petani_sawit_baru_50_dari_target.html pada 26/01/20

¹⁴ Pahlevi, A. 2019. Berbenah Petani Swadaya, Desa Mandiri dan Maju di Kalbar Tak Ada Perusahaan Sawit. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/10/03/berbenah-petani-swadaya-desa-mandiri-dan-maju-di-kalbar-tak-ada-perusahaan-sawit/> pada 26/01/20



Pada sisi penguasaan lahan, perkebunan swasta mendominasi luasan lahan sawit Kalbar seluas 1,09 juta ha, disusul perkebunan rakyat (413 ribu ha) dan perkebunan negara (56,7 ribu ha). Pada periode 2011-2018, perkebunan swasta memiliki rata-rata peningkatan luas sawit tertanam yang cukup signifikan dengan 91,5 ribu ha/tahun. Hal yang sama terjadi pada luas perkebunan rakyat yang memiliki rata-rata penambahan luas 19,7 ribu ha/tahun. Hal berbeda terjadi pada perkebunan negara yang justru mengalami pengurangan luas 770 ha/tahun. Fakta di atas menunjukkan secara jelas ketimpangan luasan lahan sawit di Kalbar, namun tidak demikian ketika melihat pada produktifitas masing-masing sektor yang dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

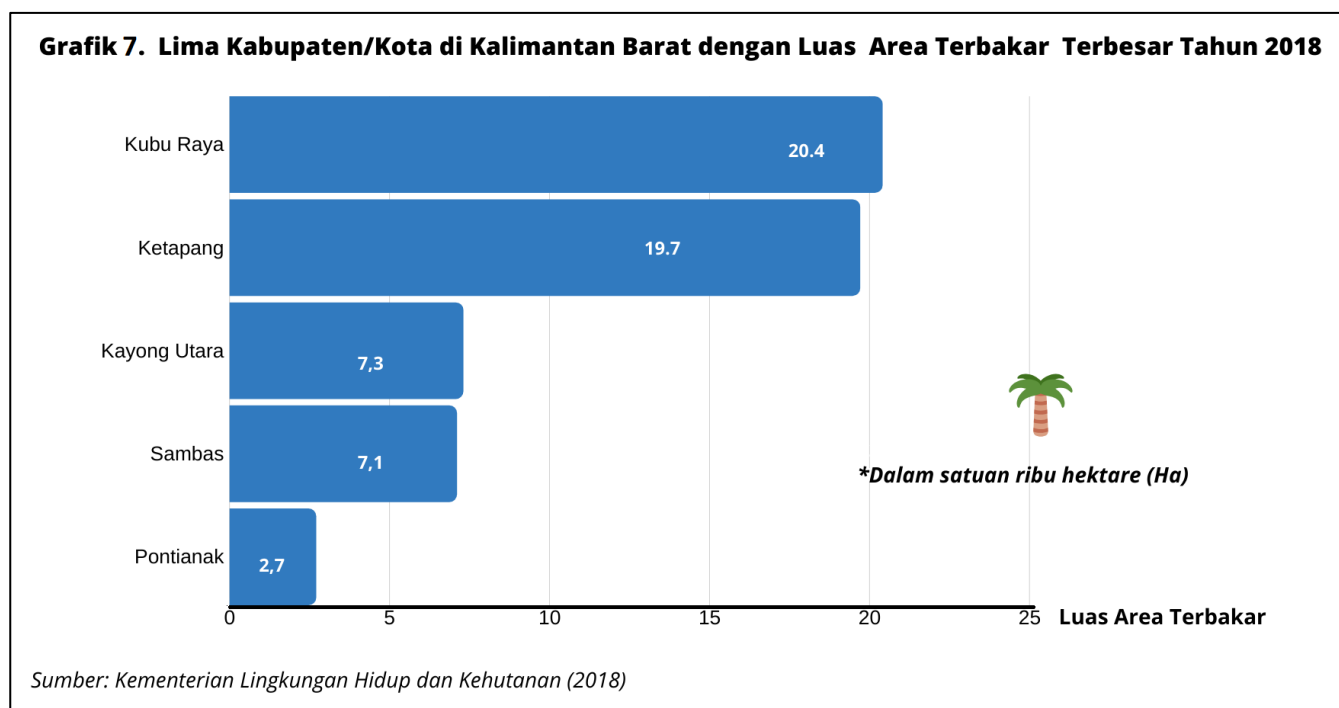


Perkebunan negara yang berada di Kabupaten Landak dan Sanggau memiliki rata-rata produktifitas tertinggi jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Walaupun produktifitas sektor ini terdapat penurunan drastis pada rentang 2012-2013, tren di tahun selanjutnya malah menunjukkan kenaikan. Hal sebaliknya terjadi pada perkebunan swasta, penambahan luas lahan tidak dibarengi dengan kondisi produktifitasnya. Rata-rata

produktifitas perkebunan swasta cenderung fluktuatif, yang mana tahun 2014 menjadi periode terbaik produktifitas sektor ini. Kemudian di dua tahun berikutnya, tingkat produktifitas sektor swasta terjun ke tingkat terendah. Pada perkebunan milik rakyat rata-rata produktifitas mengalami tren kenaikan meskipun tidak signifikan selama periode 8 tahun tersebut. Dengan fakta di atas, pembenahan produktifitas yang patut menjadi sorotan adalah tidak hanya perkebunan rakyat namun juga perkebunan swasta di Kalbar.

Rekomendasi Desa Peduli Api Kalimantan Barat

Tahun 2019, peringatan kebakaran yang terdeteksi di Kalbar mencapai 10.861 peringatan. Angka tersebut membuat Kalbar menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terbanyak di Indonesia¹⁵. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, satelit VIIRS milik NASA mencatat terdapat kurang lebih 30.600 titik panas di seluruh wilayah Kalbar. Data yang berhasil dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 juga membuktikan bahwa titik panas tersebut berkembang menjadi kebakaran hutan dan menghanguskan setidaknya 68.872 ha area lahan di Kalbar. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada Grafik 7 di bawah ini.



Grafik di atas menunjukkan Kubu Raya dan Ketapang menjadi dua wilayah dengan luasan area terbakar terluas di Kalbar pada tahun 2018. Upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalbar menjadi sangat penting. Sebab provinsi yang memiliki luas wilayah sekitar 15 juta ha ini memiliki 8,2 juta ha luas hutan dan 1,6 juta ha lahan gambut¹⁶. Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Pertanian, Kalbar menjadi provinsi dengan laju penambahan luas perkebunan sawit tercepat. Terdapat 13 kabupaten/kota di Kalbar yang memiliki lahan perkebunan sawit dengan luasan yang beragam. Publikasi CIFOR (2015) telah mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sektor perkebunan sawit dengan bencana Karhutla. Adapun pelaku yang bertanggung jawab atas bencana ini di antaranya adalah petani sawit skala kecil yang sedang membuka lahan untuk area penanaman mereka dan oknum dari korporasi baik pemilik konsesi sawit dan kayu pulp yang berniat menebangi hutan secara ilegal untuk pembebasan lahan¹⁷.

¹⁵ Haniy, S. 2019. Kebakaran Hutan Berkepanjangan Dapat Menghambat Kemajuan Indonesia dalam Mengurangi Deforestasi. Diakses melalui <https://wri-indonesia.org/id/blog/kebakaran-hutan-mengancam-kemajuan-indonesia-dalam-mengurangi-deforestasi> pada 12/1/2020

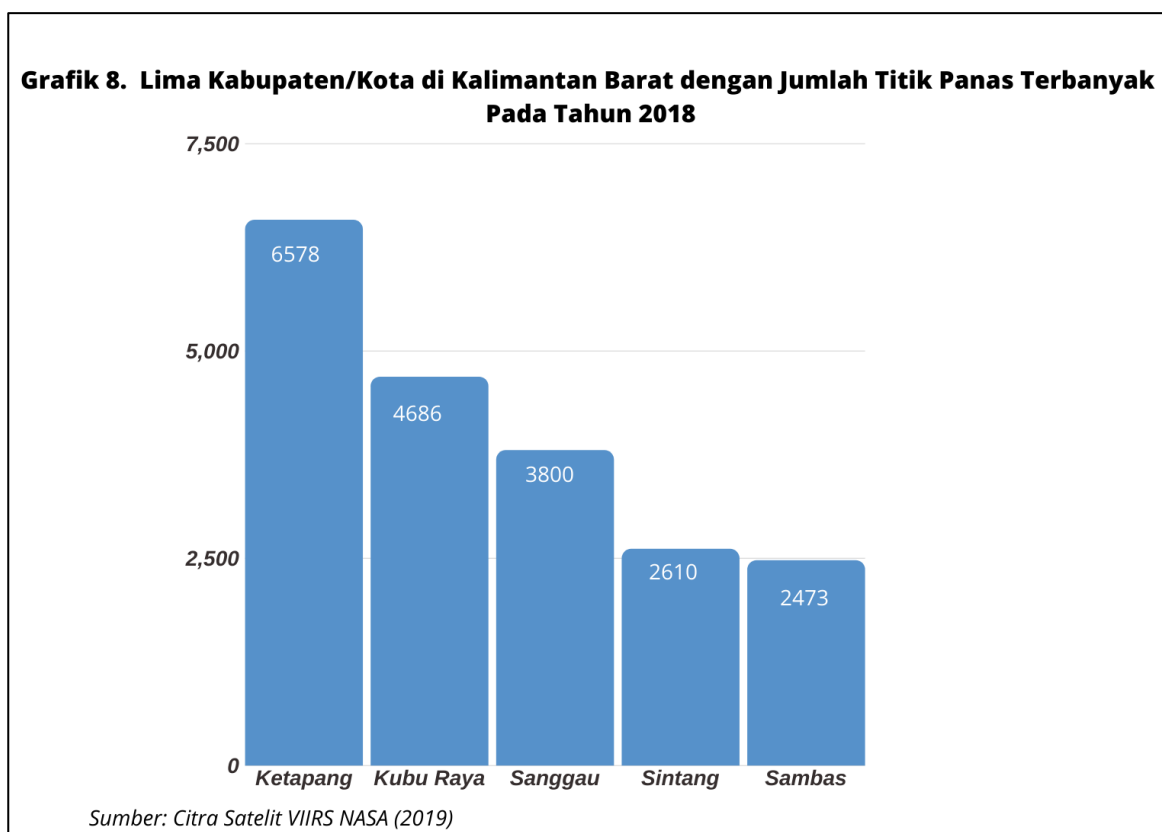
¹⁶ KLHK. 2015. Indonesian National Carbon Accounting System: Kalimantan Barat. Diakses Melalui <http://incas.menlhk.go.id/id/data/west-kalimantan/> pada 12/1/2020

¹⁷ Balch, O. 2015. Indonesia's forest fires: everything you need to know. Diakses Melalui <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/nov/11/indonesia-forest-fires-explained-haze-palm-oil-timber-burning> pada 12/1/2020

Menyikapi hal tersebut, sudah semestinya upaya pencegahan Karhutla dilakukan secara komprehensif dan multisektoral baik masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai regulator. Salah satu langkah alternatif yang dapat dilakukan pemerintah provinsi dalam rangka pencegahan Karhutla yakni dengan mendorong inisiasi pihak swasta untuk membentuk desa peduli api di wilayah yang rawan Karhutla. Hal ini layak dilakukan mengingat perusahaan sawit telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang cukup dalam upaya pencegahan Karhutla sebagai implementasi konkrit dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Lebih dari itu, penting adanya pendampingan bagi masyarakat dengan kepemilikan lahan kecil, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan lahan pertanian mereka secara bijaksana dan meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan teknologi.¹⁸

Berkaca Pada Karhutla 2018

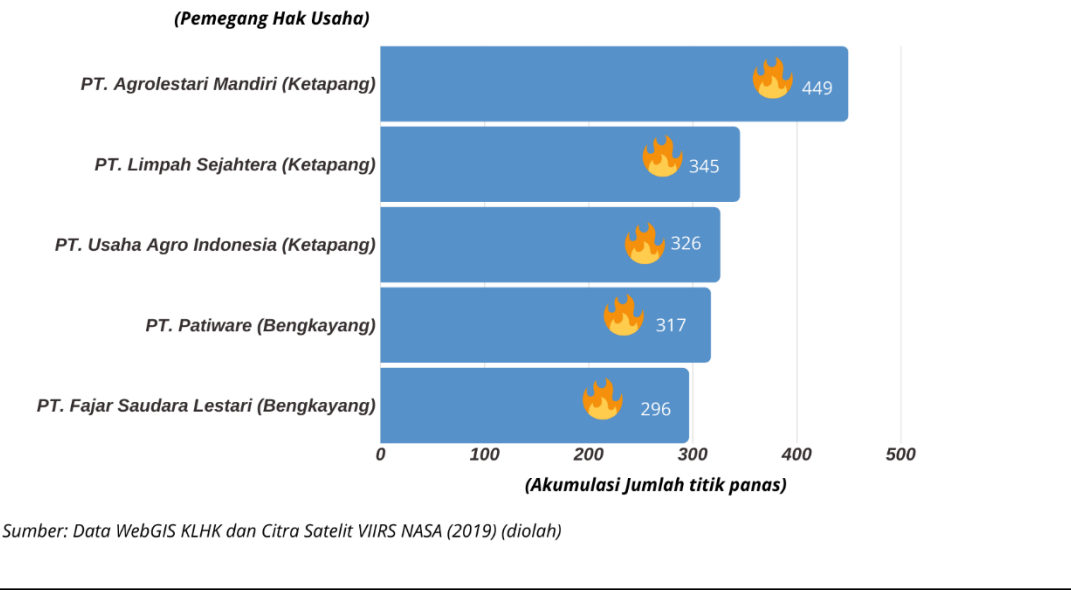
Penentuan prioritas desa peduli api dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi wilayah desa yang berdampingan dengan perusahaan sawit yang telah terindikasi terdapat titik api. Berkaca dari data yang telah tersedia, telah ditemukan lima kabupaten di Kalbar dengan jumlah titik panas terbanyak. Lengkapnya dapat dilihat di Grafik 8.



Di antara 14 kota dan kabupaten di Kalbar, Ketapang dan Kubu Raya secara berturut – turut menempati peringkat satu dan dua sebagai kabupaten dengan jumlah titik panas terbanyak pada tahun 2018. Ketapang mengumpulkan 6.578 titik panas di sepanjang tahun 2018 dan Kubu Raya berada di peringkat kedua dengan jumlah 4.686 titik panas. Persebaran titik panas di Kalbar terjadi di semua fungsi kawasan tata guna lahan baik di Kawasan Hutan (KH), Area Penggunaan Lain (APL), dan Kawasan Hak Guna Usaha (HGU). Dari total 30.600 titik panas yang tersebar di wilayah administrasi Kalbar, 1.691 titik diantaranya berada di kawasan HGU. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan HGU juga berkontribusi dalam terjadinya Karhutla di Provinsi Kalbar tahun 2018. Hasil analisis spasial mendapati terdapat lima pemegang HGU dengan titik panas terbanyak dari tahun 2012- 2018. Lengkapnya dapat dilihat pada Grafik 9.

¹⁸ CIFOR. 2018. Penelitian Aksi Partisipatif Pencegahan Kebakaran dan Restorasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Grafik 9. Lima Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Barat dengan Titik Panas Terbanyak Pada Periode 2012-2018



Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa terdapat 5 pemegang HGU dengan jumlah titik panas terbanyak yang juga berada di kabupaten dengan jumlah mill dan titik panas sawit terbanyak. PT. Agrolestari Mandiri yang berada di Ketapang menjadi pemegang HGU dengan jumlah titik panas terbanyak yaitu sebesar 449 titik. Selain daftar HGU dengan titik panas terbanyak dari tahun 2012-2018 yang telah disebutkan di atas, terdapat 2 nama HGU yang pada kawasannya selalu ditemui titik panas pada tiap tahunnya pada periode tahun 2012-2018. Adapun perusahaan tersebut yakni PT. Mitra Karya Sentosa dan PT. Kebun Ganda Prima. Kedua perusahaan tersebut memiliki area kawasan HGU yang berada di Kabupaten Sanggau, Ketapang, dan Kayong Utara dengan jumlah desa yang termasuk dalam kawasan tersebut terdiri dari 18 desa.

Fakta lain memperkuat bukti bahwasanya benang merah antara sawit dan Karhutla adalah keberadaan mill sawit atau pabrik kelapa sawit (PKS). Hubungan antara mill sawit, lahan perkebunan sawit dan titik panas juga dapat dijelaskan melalui jumlah titik panas dalam radius 10 Kilometer dari mill sawit. Penentuan radius 10 Kilometer diambil berdasarkan pertimbangan bahwa jarak tersebut adalah jarak maksimum tandan buah segar (TBS) dapat dipindahkan dan tidak rusak¹⁹. Lebih lanjut, terdapat setidaknya 13.300 titik panas yang berada di kawasan HGU, dan 8.300 titik di antaranya terdapat di radius kurang dari 10 Kilometer pada jarak mill sawit terdekat. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar titik panas yang ditemukan secara tidak langsung semata-mata karena mill sawit butuh pasokan TBS untuk kemudian diolah menjadi suatu produk yang bernilai jual lebih. Salah satu upaya untuk memenuhi target produksi mill sawit adalah dengan menambah pasokan bahan baku yang dalam prosesnya juga melibatkan kegiatan pembakaran seperti temuan CIFOR yang telah dijelaskan sebelumnya.

Desa Tangguh Api Sangat Mungkin untuk Diwujudkan

Di antara 32 desa yang wilayahnya dekat dengan konsesi sawit dan memiliki titik panas terbanyak, hanya satu desa yang masuk dalam prioritas patroli Manggala Agni Kalbar yaitu desa Rukmajaya di Kecamatan Sungai Raya Kepula Kabupaten Bengkayang. Penentuan desa rawan bencana kebakaran hutan itu sendiri diputuskan berdasarkan usulan Daops Manggala Agni yang dihimpun oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla KLHK, serta Balai Besar/Balai KSDA yang akan menjadi sasaran patroli terpadu pencegahan Karhutla tahun 2017.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. SK 5/PKHL/PKHL/PPI.4/1/2017 maka masih ada 31 desa lainnya yang belum dijadikan desa prioritas dalam program patroli terpadu pencegahan Karhutla yang terdapat di wilayah HGU dengan jumlah titik panas terbanyak. Keberadaan titik panas belum tentu menandakan adanya kebakaran hutan dan lahan, namun hal tersebut juga

¹⁹ Gaveau, D. 2017. New map helps track palm-oil supply chains in Borneo. Diakses melalui <https://forestsnews.cifor.org/52817/new-map-helps-track-palm-oil-supply-chains-in-borneo?fnl=en> pada 12/1/2020

patut diwaspadai. Titik panas adalah ancaman awal yang dapat berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Adapun desa- desa yang belum termasuk desa prioritas tersebut tersebar di kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Kubu Raya.

Melihat berbagai uraian di atas serta mempertimbangkan *track record* dari perusahaan sawit yang lahannya terdapat titik panas dan berulang setiap tahunnya, akan lebih baik jika pemerintah provinsi mempertimbangkan 31 desa lainnya tersebut sebagai fokus pemantauan titik panas. Besar kemungkinan akan terjadinya pola yang sama, dimana kebakaran hutan akan terjadi di dalam area HGU dengan titik panas terbanyak, pun kawasan HGU tersebut memiliki rekam jejak buruk akan pengendalian titik panas di tahun-tahun sebelumnya. Dengan pertimbangan alokasi APBD untuk pengendalian Karhutla, Kalbar masih relatif minim dan tidak dialokasikan secara spesifik untuk mendanai seluruh aspek pencegahan dan pengendalian Karhutla²⁰. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antar pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi ataupun swasta selaku pemilik konsesi sawit untuk menginisiasi penambahan jumlah desa peduli api. Bagi pemerintah daerah, kegiatan yang terkait dengan desa peduli api dapat dijadikan program desa yang kemudian anggarannya dapat diambil dari dana desa untuk membiayai operasional kegiatan. Perusahaan pun dapat bekerja sama dengan desa - desa yang berada di kawasan HGU nya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan desa yang tangguh bencana. Pihak akademisi pun berperan penting dalam memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia setempat serta pengembangan teknologi untuk mitigasi bencana Karhutla. Kerja sama antar sektor tersebut diharapkan dapat mewujudkan desa dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana Karhutla dan juga ikut berpartisipasi aktif dan waspada terhadap potensi kebakaran hutan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kesimpulan

Tantangan terbesar terkait perkebunan kelapa sawit bagi pemerintah Kalbar saat ini adalah rendahnya tingkat produktifitas, masih tingginya angka kemiskinan, dan potensi bencana karhutla yang tinggi. Perluasan wilayah tanam kelapa sawit di Kalbar tidak selalu berbanding lurus dengan produktifitas yang meningkat dan pengurangan angka kemiskinan. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan peningkatan produktifitas sawit secara optimal dan tidak melakukan penambahan luas perkebunan sawit. Ini sejalan dengan amanat Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit. Perbaikan produktifitas perkebunan rakyat dan swasta menjadi kunci, sebab dua sektor ini memilik rata-rata penambahan luas yang tinggi namun tidak dibarengi dengan kuantitas produktifitas. Selain itu upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan fokus menyeimbangkan antara jenis komoditas di suatu wilayah. Sehingga antara kelapa sawit dan komoditas perkebunan lainnya dapat menjadi kontributor dan substitusi sumber perekonomian daerah menyikapi kondisi pasar yang bergejolak. Ketergantungan suatu wilayah pada satu komoditas tentunya membuat ketahanan ekonomi maupun pangan wilayah tersebut akan sangat riskan. Lebih lanjut, terdapat 31 desa di Kalbar yang dapat menjadi fokus pembentukan Desa Peduli Api. Mengingat 31 desa tersebut wilayahnya berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang memiliki jumlah titik panas terbanyak, upaya kolaboratif multipihak sangat mungkin untuk diwujudkan baik melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan maupun pemanfaatan dana desa.

²⁰ Eryan,A dan dkk. 2018. Penilaian Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Diakses melalui <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Laporan-Audit-Karhutla-Daerah-dan-Pusat-180104-ICEL-1.pdf> pada 16/1/2020